

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI ISLAM: KAJIAN KEBIJAKAN DAN PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA DIGITAL

Muhammad Farhan Ferdino¹, Yolanda², Saipul Annur³, Tutut Handayani⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email :

mfarhanferdino_24052160026@radenfatah.ac.id,
yolanda_24052160023@radenfatah.ac.id, saipulannur_uin@radenfatah.ac.id,
tutuhandayani_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRAK

Pengembangan pendidikan tinggi Islam di era digital merupakan bagian dari transformasi sistem pendidikan yang menuntut respons cepat dan adaptif dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Kajian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual arah kebijakan pengembangan pendidikan tinggi Islam dan strategi penguatan sumber daya manusia (SDM). Masalah ini ditangani dengan menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka. Data diperoleh dari artikel, buku-buku yang relevan, dan manuskrip tentang pengembangan pendidikan tinggi Islam. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan strategis seperti transformasi digital, tata kelola modern, dan program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka perlu disinergikan dengan kesiapan dan kompetensi SDM agar dapat diimplementasikan secara optimal. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan teknologi, rendahnya literasi digital, serta resistensi terhadap perubahan budaya akademik. Oleh karena itu, diperlukan model penguatan SDM yang mencakup transformasi kelembagaan, pelatihan berkelanjutan, dan kolaborasi lintas sektor. Studi ini merekomendasikan sinkronisasi antara arah kebijakan dan kapasitas SDM sebagai kunci keberhasilan transformasi digital PTKI secara berkelanjutan dan berdaya saing.

Kata Kunci: *Pengembangan, Pendidikan Tinggi Islam, Kebijakan, Sumber Daya Manusia, Era Digital.*

ABSTRACT

The development of Islamic higher education in the digital era is part of a broader transformation of the education system, which demands a rapid and adaptive response from Islamic Higher Education Institutions (PTKI). This study aims to conceptually examine the policy direction of Islamic higher education development and strategies for strengthening human resources (HR). The issue is addressed using qualitative research, with data collection conducted through literature review. Data were obtained from relevant articles, books, and manuscripts on the development of Islamic higher education. The data were then analyzed using descriptive analysis techniques. The findings of the study indicate that strategic policies such as digital transformation, modern governance, and the *Merdeka Belajar–Kampus Merdeka* (Freedom to Learn–Independent Campus) program need to be synergized with the readiness and competence of human resources to be implemented optimally. The challenges faced include limited access to technology, low digital literacy, and resistance to changes in academic culture. Therefore, a human resource strengthening model is required, encompassing institutional transformation, continuous training, and cross-sector collaboration. This study recommends synchronizing policy direction with human resource capacity as the key to sustainable and competitive digital transformation of PTKI.

Keywords: *Development, Islamic Higher Education, Policy, Human Resources, Digital Era.*

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk individu agar mampu membangun peradaban yang bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agamanya (Annur et al., 2024). Fungsi strategis pendidikan terletak pada kemampuannya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Dalam perspektif Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap umat. Keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada sejumlah aspek, salah satunya adalah tersedianya lembaga pendidikan yang berkualitas (Taufik et al., 2023).

Negara Indonesia dengan mayoritas muslimnya telah berkontribusi besar dalam membangun pendidikan Islam yang tersistem mulai dari pesantren sampai dengan perguruan tinggi, tanpa terkecuali Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI). Motivasi besar untuk memajukan Islam melalui pendidikan tinggi keagamaan tidak lepas dari sejarah panjang perjuangan umat Islam yang pernah mengalami masa penjajahan, kemunduran, dan disintegrasi sosial. Lembaga seperti pesantren dan madrasah seringkali tidak terlibat dalam arus kemajuan modern, demikian pula lembaga pendidikan Islam lainnya (Alwan et al., 2023).

Dorongan umat Islam Indonesia dalam mengembangkan perguruan tinggi Islam didasari oleh sejumlah tujuan penting. Pertama, untuk melakukan pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu agama Islam secara lebih sistematis dan terarah di tingkat pendidikan tinggi. Kedua, untuk memperluas jangkauan dakwah Islam agar dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Ketiga, untuk mencetak kader-kader ulama dan tokoh agama yang dapat berkiprah di instansi pemerintah, sektor swasta, serta lembaga sosial, dakwah, dan pendidikan. Dengan demikian, keberadaan perguruan tinggi Islam memiliki posisi strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat yang dilandasi ajaran Islam (Rodin et al., 2025).

UIN, IAIN, STAIN, dan STAIS yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama memiliki peran utama sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pengajaran Islam tingkat lanjutan serta berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Seiring berjalannya waktu, lembaga-lembaga ini dituntut untuk menjawab perubahan zaman dengan menghasilkan lulusan yang responsif

terhadap dinamika sosial, serta memiliki kompetensi akademik yang sesuai dengan tuntutan era digital (Kurniasih, 2021).

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan secara global. Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran, pengelolaan kampus berbasis digital, serta sistem evaluasi yang semakin kompleks, mendorong perlunya pembaruan sistem pendidikan tinggi, termasuk di lingkungan PTKI. Hal ini selaras dengan perkembangan era 4.0 yakni revolusi industri serta 5.0 era *society* yang menekankan integrasi antara manusia dan teknologi (Ferdino et al., 2024). Oleh karena itu, arah kebijakan pengembangan pendidikan tinggi Islam harus dirancang secara visioner dan adaptif, tidak hanya menyentuh aspek kurikulum dan kelembagaan, tetapi juga penguatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

Dengan demikian, pendidikan tinggi Islam memiliki peran krusial dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas baik secara intelektual sekaligus spiritual. Perjalanan umat Islam Indonesia dalam membangun sistem pendidikan Islam, dari pesantren hingga ke jenjang perguruan tinggi, menunjukkan adanya komitmen yang kuat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan dakwah Islam. Di tengah arus perubahan zaman dan tantangan digitalisasi, PTKI dituntut untuk terus berinovasi dan melakukan transformasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Oleh sebab itu, kebijakan pengembangan pendidikan tinggi Islam harus diarahkan secara visioner, adaptif, serta menitikberatkan pada peningkatan mutu secara menyeluruh demi melahirkan generasi unggul yang berkarakter Islami.

Dalam konteks ini, penguatan sumber daya manusia menjadi unsur penting dalam arah pengembangan pendidikan tinggi Islam ke depan. Penguatan SDM tidak hanya menasar peningkatan kualifikasi akademik, tetapi juga meliputi kompetensi pedagogik, kemampuan mengadaptasi teknologi digital, serta penguatan profesionalisme dan etos kerja. Transformasi pendidikan tinggi Islam hanya dapat tercapai jika kebijakan yang diterapkan sejalan dengan upaya sistematis dalam membangun kapasitas individu maupun kelembagaan secara berkelanjutan.

Namun demikian, terdapat permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu sejauh mana arah kebijakan pengembangan pendidikan tinggi Islam telah sinkron dengan kapasitas SDM yang tersedia dalam menghadapi tantangan era digital. Ketidaksesuaian antara kebijakan strategis dan kesiapan sumber daya manusia menjadi

kendala krusial yang dapat menghambat keberhasilan transformasi digital di lingkungan PTKI. Permasalahan ini perlu ditinjau secara mendalam untuk menemukan solusi konseptual dan strategis.

Untuk mendasari pembahasan ini, kajian ini merujuk pada Human Capital Theory dari Gary S. Becker (1993), yang menekankan bahwa kualitas pendidikan dan keterampilan individu merupakan investasi penting bagi pembangunan dan pertumbuhan institusi (Khairunnisa et al., 2024). Selain itu, digunakan pula Organizational Learning Theory oleh Argyris dan Schön (1978), yang menyatakan bahwa organisasi akan mampu bertahan dan berkembang apabila mampu melakukan pembelajaran secara adaptif dan reflektif terhadap perubahan lingkungan (Pudjiarti, 2023). Kedua teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan transformasi digital di PTKI harus diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan dan kontekstual.

Sehingga artikel ini bertujuan untuk membahas aspek utama dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam di era digital, mulai dari konsep dan arah kebijakan, implementasi, tantangan, hingga strategi penguatan sumber daya manusia di lingkungan PTKI. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam merumuskan arah pendidikan tinggi Islam yang responsif, kolaboratif, dan memiliki daya saing di tengah deras arus globalisasi dan digitalisasi.

METODE PENELITIAN

Kualitatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini, yang memiliki fokus pada eksplorasi proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data tanpa menggunakan metode statistik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan menelaah berbagai sumber literatur seperti artikel ilmiah, buku, catatan akademik, serta referensi lain yang relevan dari penelitian terdahulu (Hasan, 2002). Pada tahap analisis data, digunakan pendekatan deskriptif untuk mengolah informasi yang diperoleh secara sistematis. Data yang terkumpul dianalisis secara teliti, disusun dengan runtut, dan diorganisasi agar menghasilkan pemahaman menyeluruh dan memberikan sudut pandang baru terhadap isu yang dikaji (Ferdino & Sirozi, 2025).

Hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk narasi deskriptif guna menggambarkan temuan secara lebih mendalam. Proses ini mencakup klasifikasi data serta identifikasi pola dan hubungan antar kategori yang berkaitan dengan fokus kajian.

Selain itu, metode dokumentasi juga digunakan, yakni dengan menelaah dokumen tertulis yang relevan tanpa melakukan observasi langsung di lapangan. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur ilmiah, baik berupa buku maupun artikel jurnal, yang membahas tentang pengembangan pendidikan tinggi Islam dalam konteks kebijakan dan penguatan sumber daya manusia di era digital.

PEMBAHASAN

Konsep dan Arah Penerapan Kebijakan Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam

Setiap institusi pendidikan memiliki tujuan untuk mencetak ilmuwan yang kompeten, dan menginginkan agar ilmu pengetahuan tidak hanya diwariskan serta diolah sebagai materi pembelajaran, tetapi juga disertai dengan upaya untuk mempersiapkan pemanfaatannya secara nyata. Kondisi ini membangkitkan kesadaran dari berbagai kalangan untuk meninjau kembali peran yang dimainkan oleh perguruan tinggi. Kepedulian masyarakat terhadap keberadaan pendidikan tinggi secara umum tercermin dalam meningkatnya kesadaran akan pentingnya relevansi serta kontribusi nyata pendidikan tinggi dalam proses pembangunan masyarakat (Zainudin, 2023).

Dalam konteks itu, pengembangan pendidikan tinggi Islam tidak dapat dilepaskan dari visi besar Islam dalam membangun peradaban berbasis ilmu dan nilai-nilai keislaman. Perguruan tinggi Islam memegang dua mandat utama: sebagai institusi akademik yang melahirkan lulusan berkualitas dan sebagai agen perubahan sosial yang menanamkan nilai keadaban, keadilan, serta semangat keberagaman yang toleran. Karena itu, arah pengembangannya harus mampu menjawab tantangan global tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam (Yakin, 2005).

Secara konsep transformasi kelembagaan dari STAIN menjadi IAIN, lalu ke UIN, menunjukkan adanya dinamika perkembangan dalam aspek keilmuan dan kebijakan. Meski demikian, proses transformasi ini sebaiknya tidak dilakukan secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan dampaknya. Ketika semua STAIN dan IAIN diubah menjadi UIN, terdapat kekhawatiran bahwa fakultas-fakultas keagamaan menjadi tersisihkan dan kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Upaya perubahan status ini sejatinya bertujuan untuk mengintegrasikan kembali berbagai disiplin ilmu yang sebelumnya dipandang terpisah-pisah (Bashori et al., 2020).

Secara garis besar, lembaga pendidikan tinggi, termasuk Pendidikan Tinggi Islam (PTI), memiliki sejumlah tujuan utama. *Pertama*, melaksanakan dan mengembangkan

proses pendidikan serta pengajaran pada jenjang di atas pendidikan menengah dalam ranah ilmu pengetahuan dan kebudayaan sosial. *Kedua*, mengadakan dan memperluas kegiatan penelitian. *Ketiga*, menjalankan serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai agen sosial, pendidikan Islam dalam konteks modernisasi dan globalisasi saat ini dituntut untuk tampil secara aktif dan responsif dalam menjalankan perannya. Eksistensinya diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya perbaikan kehidupan umat Islam, baik dalam aspek intelektual maupun praktik keseharian. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana internalisasi moral untuk menangkal dampak negatif globalisasi, tetapi lebih dari itu, ia harus menjadi kekuatan pembebas dari belenggu kemiskinan, ketidaktahuan, serta keterbelakangan dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi (Roqib, 2017).

Oleh karena itu, pendidikan tinggi Islam memiliki peranan penting dalam mencetak para ilmuwan yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menerapkannya demi kemaslahatan masyarakat luas. Meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya relevansi pendidikan tinggi menunjukkan urgensi pengembangan yang sejalan dengan misi Islam dalam membangun peradaban berlandaskan ilmu dan nilai-nilai keislaman. Transformasi kelembagaan dari STAIN menjadi IAIN, lalu berkembang menjadi UIN, mencerminkan adanya dinamika dalam bidang keilmuan dan kebijakan, meskipun posisi sentral ilmu-ilmu keislaman tetap harus dijaga. Sebagai agen perubahan sosial, pendidikan tinggi Islam tidak hanya berfungsi sebagai lembaga akademik, tetapi juga diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan yang membebaskan umat dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan. Oleh karena itu, arah pengembangan pendidikan tinggi Islam harus bersifat menyeluruh, relevan dengan konteks zaman, dan berfokus pada upaya pemberdayaan umat secara komprehensif.

Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) bersifat multidimensional, di mana institusi ini dituntut untuk menjadi motor penggerak perubahan dalam pola keberagamaan masyarakat. PTKI dihadapkan pada tantangan untuk mengembangkan teologi "*Unity in Diversity*" sebagai dasar moral publik yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Lembaga ini juga diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kerangka keilmuan mereka, khususnya dalam mengembangkan prinsip ketuhanan dalam konsep-konsep agama publik. Selain itu, PTKI perlu berperan aktif dalam pengembangan riset, pendidikan, dan layanan yang berpijak pada spiritualitas

sebagai dasar untuk membangun etos kerja positif, sehingga para lulusan yang memiliki pemahaman keagamaan mendalam dapat menjadi penyubur nilai-nilai etika dan kasih sayang di tengah kehidupan masyarakat yang kering secara moral (Basri, 2002).

Dari aspek kebijakan, pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) di bawah Kementerian Agama RI telah menginisiasi berbagai langkah strategis. Salah satu pedoman utama yang menjadi rujukan adalah Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Islam 2020–2045, yang menitikberatkan pada pentingnya tata kelola yang baik (*good university governance*), peningkatan mutu akademik, penguatan kegiatan riset dan publikasi ilmiah, internasionalisasi, serta digitalisasi sistem pendidikan (Ferdino et al., 2025). Dalam hal ini, PTKI diarahkan untuk menjadi institusi unggulan dalam pengembangan ilmu keislaman yang modern, terbuka, dan mampu bersaing secara global. Kebijakan penting lainnya adalah pelaksanaan Transformasi Digital PTKI, yang meliputi digitalisasi sistem administrasi akademik (*e-campus*), penguatan sistem pembelajaran daring (seperti *blended learning* dan *e-learning*), serta peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan melalui pembangunan infrastruktur jaringan dan laboratorium digital. Di samping itu, pendekatan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) juga mulai diterapkan sebagai upaya untuk menyesuaikan sistem pendidikan tinggi Islam dengan tuntutan dunia kerja, kewirausahaan, serta penguatan kompetensi lulusan dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah (Arifudi, 2021).

Dengan demikian, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memainkan peran penting dan beragam sebagai motor penggerak perubahan dalam membentuk corak keberagamaan masyarakat yang inklusif. PTKI diharapkan mampu mengembangkan pendekatan keilmuan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip teologis *Unity in Diversity*, serta memperkuat kontribusinya dalam bidang penelitian, pendidikan, dan layanan berbasis spiritualitas yang menanamkan etika publik. Di sisi lain, pemerintah melalui DIKTIS telah memberikan arahan agar PTKI menjadi institusi unggulan melalui kebijakan yang mencakup penguatan tata kelola, transformasi digital, peningkatan mutu sumber daya manusia, serta penerapan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Seluruh upaya ini bertujuan untuk menjadikan PTKI sebagai institusi pendidikan tinggi yang modern, responsif, dan selaras dengan tuntutan zaman serta mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan bangsa secara menyeluruh.

Tantangan dan Strategi Penguatan Sumber daya Manusia di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen kunci dalam menentukan mutu dan daya saing suatu perguruan tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Di tengah arus globalisasi dan kemajuan era digital, penguatan SDM di lingkungan PTKI menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa dihindari. Meskipun demikian, proses penguatan ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang rumit, baik dari segi kualitas, jumlah, maupun sistem pendukung yang tersedia, di mana tantangan-tantangan tersebut semakin nyata khususnya dalam konteks transformasi digital. (Aditya & Suranto, 2024).

Pertama, tidak semua lembaga pendidikan memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses teknologi dan infrastruktur yang diperlukan. Lembaga yang berada di wilayah terpencil dan kurang berkembang sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses internet yang stabil, perangkat keras yang memadai, serta dukungan teknis yang mencukupi. *Kedua*, masih banyak tenaga pendidik yang belum memiliki keterampilan maupun pelatihan yang cukup dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Kondisi ini dapat menjadi hambatan dalam penerapan teknologi secara optimal dalam kegiatan mengajar serta dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi era digital.

Ketiga, adanya perubahan budaya dan sikap resistensi terhadap inovasi, di mana penerapan teknologi pada dunia kependidikan kerap menuntut penyesuaian terhadap sistem pembelajaran dan pengajaran yang baru. Sebagian pendidik bisa saja merasa tidak nyaman atau menunjukkan keengganan dalam mengimplementasikan teknologi baru dalam proses pembelajaran mereka. *Keempat*, munculnya persoalan terkait keamanan data dan privasi, di mana penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan juga meningkatkan risiko terhadap kerahasiaan data pribadi serta informasi kelembagaan PTKI. Oleh sebab itu, sangat penting memastikan bahwa semua data yang dikumpulkan dan disimpan terlindungi secara optimal dari kemungkinan serangan siber maupun penyalahgunaan.

Kelima, tantangan terkait biaya implementasi dan keterbatasan sumber daya, karena transformasi digital memerlukan investasi besar dalam bentuk infrastruktur teknologi, perangkat lunak, pelatihan, serta dukungan teknis yang memadai. Banyak lembaga

pendidikan menghadapi keterbatasan finansial yang menjadi hambatan dalam menerapkan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi secara menyeluruh. *Keenam*, isu terkait mutu konten dan penilaian efektivitas, meskipun beragam platform pembelajaran digital telah tersedia sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sangat penting untuk menjamin bahwa materi yang disediakan selaras dengan kurikulum nasional dan standar pendidikan yang berlaku. Penilaian terhadap efektivitas penggunaan teknologi pun sering kali membutuhkan biaya besar dan belum tentu mudah untuk dilaksanakan.

Dalam menghadapi tantangan di era digital, dibutuhkan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Dalam upaya mempersiapkan transformasi digital di bidang pendidikan, pemerintah di tingkat daerah maupun nasional, bersama para pemangku kepentingan lainnya, perlu memberikan perhatian lebih terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan penguatan sistem pendidikan (Listiyoningsih et al., 2022). Tujuan utama dari agenda transformasi digital dalam pengembangan SDM pendidikan adalah mengintegrasikan teknologi secara menyeluruh ke dalam setiap aspek pendidikan, mulai dari proses pengajaran dan pembelajaran hingga kegiatan administratif.

Strategi utama yang perlu diterapkan meliputi peningkatan kompetensi SDM serta penyesuaian sarana dan prasarana dengan perubahan kebutuhan yang terus berkembang. Salah satu prioritas yang harus diutamakan adalah peningkatan kualitas tenaga pendidik agar mampu beradaptasi dan mencetak peserta didik yang sesuai dengan tuntutan era 5.0 (Harto, 2018). Beberapa pendekatan dalam strategi pembaruan kelembagaan yang bertujuan memperkuat SDM tentunya dapat dilakukan melalui berbagai cara.

Pertama, Transformasi Kelembagaan, perubahan status institusi PTAI menjadi universitas atau institut dapat menjadi langkah strategis untuk menjawab berbagai persoalan. Transformasi ini mencakup penyesuaian status, struktur organisasi, visi dan misi, kurikulum, serta pengembangan sumber daya manusianya. *Kedua*, Penguatan Keahlian dan Profesionalisme Mahasiswa, fokus pada peningkatan keterampilan dan sikap profesional mahasiswa perlu menjadi prioritas dalam reformasi kelembagaan. Langkah ini bisa ditempuh melalui pengembangan kurikulum yang relevan, perbaikan sistem rekrutmen, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak.

Ketiga, Reformulasi Paradigma Keilmuan, pendekatan ilmu yang masih bersifat dikotomis wajib digeser menuju pendekatan lebih inklusif serta terbuka. Hal tersebut

dapat dilaksanakan secara menyinergikan beberapa bidang keilmuan, menyeimbangkan aspek ilmu keislaman dan ilmu umum, serta merespons dinamika sosial, politik, ekonomi dan budaya. *Keempat*, Peningkatan Mutu Manajerial, kualitas manajemen yang menjadi standar harus ditingkatkan untuk mengeluarkan alumni yang dapat bersaing secara global. Hal ini mencakup sistem manajemen diimbangkan secara efektif serta perbaikan sarana serta prasarana pendidikan. *Kelima*, Kemitraan dan Kolaborasi. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, menjadi salah satu strategi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Kolaborasi ini dapat diwujudkan dengan lembaga lain, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam bentuk pengembangan kurikulum, pelaksanaan riset, serta berbagai aktivitas lain yang mendukung kemajuan PTAI (Hendra et al., 2023).

Dengan demikian, penguatan SDM (Sumber daya manusia) di lingkungan PTKI (Perguruan tinggi Keagamaan Islam) menjadi kebutuhan yang sangat mendesak di tengah era globalisasi dan digitalisasi. Tantangan yang dihadapi meliputi kesenjangan akses teknologi, rendahnya kemampuan digital tenaga pendidik, resistensi terhadap inovasi, risiko keamanan data, keterbatasan anggaran, serta belum maksimalnya mutu konten pembelajaran digital. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan kerja sama semua pihak, terutama pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan Islam, guna memperkuat kesiapan SDM serta infrastruktur pendukungnya. Strategi penguatan SDM meliputi reformasi kelembagaan PTKI, peningkatan keterampilan dan profesionalisme mahasiswa, pergeseran paradigma keilmuan yang lebih terbuka, perbaikan kualitas tata kelola pendidikan, serta penguatan jaringan kerja sama di tingkat lokal hingga global. Prioritas utamanya adalah peningkatan kualitas tenaga pendidik agar mampu mencetak lulusan yang tangguh dan kompetitif di era Revolusi Industri 5.0.

Sinkronisasi Kebijakan dan SDM dalam Mewujudkan Transformasi Digital PTKI

Transformasi digital di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) tidak hanya menyangkut penyediaan infrastruktur teknologi, tetapi lebih mendalam lagi merupakan proses transformasi budaya, tata kelola, dan paradigma pendidikan itu sendiri. Dalam proses tersebut, sinkronisasi antara arah kebijakan dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi syarat utama agar transformasi digital dapat berjalan efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Secara kebijakan, Kemenag melalui Diktis (Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam) telah merumuskan berbagai langkah strategis, seperti Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Islam 2020–2045 yang menekankan penguatan tata kelola, peningkatan mutu akademik, digitalisasi sistem administrasi dan pembelajaran, serta internasionalisasi PTKI. Kebijakan ini menandai sebuah langkah progresif dalam menempatkan PTKI sebagai aktor utama dalam pembangunan keilmuan Islam yang modern dan responsif terhadap tantangan global. Namun, kebijakan yang baik tanpa dukungan SDM yang memadai akan kehilangan daya dorongnya. Oleh karena itu, sinkronisasi perlu dilakukan dengan menciptakan keselarasan antara tujuan kebijakan dengan kapasitas dan kompetensi SDM di internal PTKI. Hal ini tidak hanya menuntut pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi dosen dan tenaga kependidikan, tetapi juga reformasi manajerial, kurikulum, serta sistem rekrutmen dan promosi SDM berbasis kompetensi digital dan integritas akademik.

Lebih lanjut, sinkronisasi ini juga menyentuh dimensi nilai. PTKI tidak sekadar mengadopsi digitalisasi sebagai alat bantu administratif dan akademik, melainkan sebagai bagian dari misi epistemologis Islam yang mengedepankan ilmu sebagai cahaya peradaban (an-nūr). Maka, transformasi digital harus diarahkan pada pengembangan sistem pendidikan yang inklusif, kolaboratif, dan terintegrasi antara nilai-nilai keislaman dengan teknologi modern. Akhirnya, transformasi digital di PTKI tidak boleh hanya menjadi sekadar tren, melainkan harus menjadi bagian integral dari roadmap pengembangan institusi menuju kampus Islam masa depan yang unggul secara akademik, kokoh secara spiritual, dan tangguh secara teknologi. Kunci keberhasilan terletak pada sejauh mana kebijakan dapat menjawab realitas kebutuhan SDM, dan sebaliknya sejauh mana SDM mampu menterjemahkan kebijakan ke dalam inovasi nyata.

KESIMPULAN

Pengembangan pendidikan tinggi Islam di era digital merupakan kebutuhan strategis untuk menjawab tantangan global dan membentuk generasi yang unggul secara intelektual dan spiritual. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dituntut menjadi agen perubahan yang adaptif, dengan memperkuat peran dalam pengembangan keilmuan Islam yang integratif dan relevan dengan nilai-nilai Pancasila serta dinamika masyarakat modern. Kebijakan pengembangan yang telah dirancang pemerintah melalui DIKTIS, seperti transformasi digital dan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, perlu

diimplementasikan secara selaras dengan penguatan SDM. Tantangan seperti kesenjangan teknologi, keterbatasan kompetensi digital, serta resistensi terhadap perubahan menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, sinkronisasi antara arah kebijakan dan kesiapan SDM menjadi kunci keberhasilan transformasi pendidikan tinggi Islam. Hanya dengan dukungan SDM yang kompeten, profesional, dan berpandangan visioner, PTKI dapat menjalankan perannya sebagai pusat keunggulan keilmuan Islam yang modern, berdaya saing, dan kontributif terhadap pembangunan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. Q., & Suranto, S. (2024). The Role of Educational Transformation in the Digital Era in Improving Student Quality. *L Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(3), 1756. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3301>
- Alwan, H., A. A., & Akhyar, Y. (2023). Perkembangan Pendidikan Tinggi ISLAM di Indonesia (Studi Kasus STIT AI-Kifayah Ke STAI AI-Kifayah). *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 12(4), 901. <https://doi.org/10.58230/27454312.324>
- Annur, S., Ibrahim, I., & Febrianto, A. (2024). Pelaksanaan Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar Di SMP Negeri 55 Palembang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 9343. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8985>
- Arifudi, L. (2021). Pengembangan Dan Pembaharuan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Di Indonesia: Gagasan Dan Implementasinya. *Al-Afkar : Journal of Islamic Studies*, 4(2), 432.
- Bashori, Yolanda, M., & Wulandari, S. (2020). Konsep Kepemimpinan Abad 21 Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 115.
- Basri, H. (2002). *Dinamika Pemikiran Islam Di Perguruan Tinggi: Wacana Tentang Pendidikan Agama Islam*.
- Ferdino, M. F., Ismail, F., & Afgani, M. W. (2025). Inovasi dalam Organisasi Pendidikan: Kepekaan, Proses, dan Pengambilan Keputusan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 480–487. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.408>
- Ferdino, M. F., & Sirozi, M. (2025). Dampak Ekonomi Neoliberal terhadap Sistem dan Tata Kelola Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 6(1), 86. <https://doi.org/10.51673/jips.v6i1.2457>
- Ferdino, M. F., Zuhdiyah, Z., & Handayani, T. (2024). Peran Pendekatan Sosial pada Pendidikan Islam Sebagai Solusi dalam Menghadapi Tantangan Perubahan Zaman. *Attractive : Innovative Education Journal*, 6 (3), 135. <https://doi.org/https://doi.org/10.51278/aj.v6i3.1467>
- Harto, K. (2018). Tantangan Dosen PTKI di Era Industri 4.0. *Jurnal Tatsqif*, 16(1), 1–15.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Penulisan dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Hendra, Ishomuddin, & Faridi. (2023). Pembaharuan Kelembagaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam: Tantangan Dan Peluang Dalam Era Modernisasi. *Tajdid : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 7(2), 165. <https://doi.org/10.52266/tajdid.v7i1.1851>

- Khairunnisa, K., Aprison, W., & Pratama, A. R. (2024). Mengintegrasikan Pembiayaan Pendidikan Islam dengan Kebijakan Nasional dalam Mewujudkan SDGs No. 4 : Kajian QS. Al-Mujadallah Ayat 12-13, UU No. 20 Tahun 2003, dan Teori Human Capital. *Jurnal Visi Manajemen*, 10(1), 10. <https://doi.org/10.56910/jvm.v10i1.504>
- Kurniasih, A. (2021). Pendekatan Studi Islam di Perguruan Tinggi Islam. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 12–25.
- Listiyoningsih, S., Hidayati, D., & Winarti, Y. (2022). Strategi Guru Menghadapi Transformasi Digital. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2b), 65–662. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2b.389>
- Pudjiarti, E. S. (2023). Transformasi Organisasi: Membangun Kultur Pembelajaran untuk Menghadapi Tantangan Masa Kini. *BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS*, 2(1), 10.
- Rodin, R., Hidayah, J., Endang, Harmi, H., Fakhruddin, & Sutarto. (2025). Manajemen Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Islamdi Indonesia: Sistematic Review. *Dirasah : Jurnal Study Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 36. <https://doi.org/10.58401/dirasah.v8i1.1644>
- Roqib, M. (2017). *Ilmu Pendidikan Islam*. LkiS.
- Taufik, M., Ansori, M. A., & Andari, A. A. (2023). Dynamics of Darul Dakwah wal Irsyad Education Institute. *Scaffolding : Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 5(3), 140–156. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v5i3.3479>
- Yakin, A. (2005). *Pendidikan Multikultural*. Pilar Media.
- Zainudin. (2023). Pemikiran Tentang Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam. *Fikroh: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 3.